

**OPINI MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN PENANGKAPAN
PETUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) KEPULAUAN
RIAU OLEH POLISI MALAYSIA DI SURAT
KABAR JAWA POS**

(Studi Deskriptif Opini Masyarakat Surabaya Tentang Pemberitaan Penangkapan
Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi
Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos edisi 16-27 Agustus 2010)

SKRIPSI



Oleh :

DEASY LISTYANI PITASARI
NPM. 0543010052

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
SURABAYA
2010**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **OPINI MASYARAKAT TENTANG PEMBERITAAN PENANGKAPAN PETUGAS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN (DKP) KEPULAUAN RIAU OLEH POLISI MALAYSIA DI SURAT KABAR JAWA POS** (Studi Deskriptif Opini Masyarakat Surabaya Tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos edisi 16-27 Agustus 2010) Ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulisan laporan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat kelulusan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang dengan kesabaran telah memberikan petunjuk dan bimbingan sehingga penyusunan laporan skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar bahwa sejak melakukan tugas akhir ini banyak kekurangan, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Ec. Hj. Suparwati. M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional “Veteran” Jawa Timur.

2. Bapak Juwito,S.Sos,M.Si Ketua Program Studi Jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Nasional”Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Sulismawati, Msi selaku Dosen Pembimbing penulis telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
4. Ayahku disurga, Mama serta masku yang telah memberikan semangat, dorongan, kasih sayang serta limpahan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini
5. Pakde Poer, om Kunto yang telah mendukung penulis dalam membuat Laporan ini.
6. My Luply “Angga Julyzar Armansyah” yang telah menjadi inspirasi dan motivator dengan terus memberikan dukungan kepada penulis.
7. Sahabatku Nila Asri Rahandari, temanku Sari,Lia dan Ariesta yang selalu memberi semangat serta dorongan agar penulis dapat menyelesaikan Laporan ini.

Dengan menyadari kemampuan yang terbatas dalam penulisan laporan skripsi ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan, serta penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan dari penulisan laporan skripsi ini.

Penulis

Deasy Listyani

DAFTAR ISI

| | HALAMAN |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| ABSTRAKSI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Perumusan Masalah..... | 14 |
| 1.3 Tujuan Penelitian..... | 14 |
| 1.4 Manfaat Penelitian..... | 14 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1 Landasan Teori | 16 |
| 2.1.1 Media Komunikasi Massa..... | 16 |
| 2.2 Surat Kabar..... | 17 |
| 2.2.1 Surat Kabar Sebagai Media Komunikasi Massa..... | 19 |
| 2.2.2 Surat Kabar Sebagai Fungsi Informasi | 20 |
| 2.2.3 Surat kabar sebagai Kontrol Sosial | 21 |
| 2.3 Opini..... | 22 |

| | | |
|------------------------------------|---|----|
| 2.4 | Pengertian Berita | 24 |
| 2.5 | Hubungan Diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia Terhadap Perbatasan Wilayah Kelautan..... | 29 |
| 2.6 | Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos..... | 32 |
| 2.6.1 | Pro dan Kontra Pemberitaan Penangkapan Petugas (DKP Kepri) oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos..... | 35 |
| 2.7 | Teori S-O-R..... | 36 |
| 2.8 | Kerangka Berfikir..... | 39 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | |
| 3.1 | Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel..... | 41 |
| 3.1.1 | Definisi Operasional | 41 |
| 3.1.2 | Opini | 41 |
| 3.1.3 | Pengukuran Variabel..... | 43 |
| 3.2 | Populasi, Sampel dan Teknik Penarikan Sampel..... | 45 |
| 3.2.1 | Populasi..... | 45 |
| 3.2.2 | Sample dan Teknik Penarikan Sampel..... | 46 |
| 3.3 | Metode Analisis Data..... | 47 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | |
| 4.1 | Gambaran Umum Obyek Penelitian | 49 |
| 4.2 | Penyajian Data dan Analisa | 51 |
| 4.2.1 | Identitas Responden | 51 |

| | |
|--|-----------|
| 4.2.2 Opini Masyarakat Tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos | 54 |
| 4.3 Hasil Opini Masyarakat | 72 |
| 4.4 Analisis Data | 73 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 5.1 Kesimpulan | 76 |
| 5.2 Saran | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 79 |

DAFTAR TABEL

HALAMAN

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin | 51 |
| Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia | 52 |
| Tabel 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir | 53 |
| Tabel 4. Opini Masyarakat Tentang Penangkapan petugas(DKP)Kepulauan Riau Oleh Polisi Malaysia di Perairan Tanjung Berakit Bintan Batam..... | 54 |
| Tabel 5. Opini Masyarakat Tentang Penahanan Yang Dilakukan Oleh Polisi Malaysia Terhadap Petugas (DKP) Saat Melakukan Patroli | 55 |
| Tabel 6. Opini Masyarakat Tentang Demonstrasi Yang Dilakukan Kelompok Benteng Demokrasi Rakyat(Bendera)Indonesia didepan Kedubes Malaysia Dengan Melakukan Pelemparan Kotoran Tinja dan Pembakaran Bendera Malaysia Setelah Kejadian Penangkapan Tersebut | 57 |
| Tabel 7. Opini Masyarakat Mengenai Penangkapan Petugas (DKP) Kepri Yang Dila- kukan Oleh Polisi Malaysia Akan Membuat Hubungan Diplomatik Antara Indonesia dengan Malaysia Akan Kembali Memanas | 58 |
| Tabel 8. Opini Masyarakat Terhadap Pernyataan Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman Mengancam Mengeluarkan Travel Advisory(menghimbau- warganya tidak terbang ke Indonesia) | 59 |
| Tabel 9. Opini Masyarakat Apakah Nelayan Dari Malaysia Telah Melanggar Wilayah Perbatasan Indonesia | 61 |
| Tabel 10. Opini Masyarakat Apakah Nelayan Malaysia Yang Mencuri Ikan di Wilayah | |

| | |
|---|----|
| Perairan Indonesia Harus Dikenai Sanksi Hukum Internasional | 62 |
| Tabel 11. Opini Masyarakat Apakah Nelayan Malaysia Yang Mencuri Ikan Harus Dideportasi Sesuai Dengan Kesalahannya | 63 |
| Tabel 12. Opini Masyarakat Tentang Pernyataan MenLu Malaysia Datuk Seri Anifah Aman Mengkritik Bahwa Malaysia Tidak Ingin Menjadi Korban Masalah Politik Dalam Negeri Indonesia | 64 |
| Tabel 13. Opini Masyarakat Tentang Pernyataan MenkoPolHukam Djoko Susanto Yang Akan Mencari Bukti Apakah DKP Kepri atau Nelayan Malaysia Yang Melanggar Wilayah Perbatasan | 66 |
| Tabel 14. Opini Masyarakat Terhadap Usaha KemenLu Yang Dinilai Lembek Dalam Usaha Membebaskan Tiga Petugas DKP Kepri Yang Ditangkap di Perairan- Tanjung Berakit Bintang Tersebut | 67 |
| Tabel 15. Opini Masyarakat Tentang Tindakan <i>Police Marine</i> Malaysia Yang Menghadang Petugas DKP Kepri Saat Menangkap Nelayan Malaysia Yang Mencuri Ikan di Wilayah Perairan Indonesia | 68 |
| Tabel 16. Opini Masyarakat Tentang Tindakan Peringatan Yang Dilakukan Oleh <i>Police Marine</i> Malaysia Terhadap Petugas DKP Kepri Dengan Melepaskan Tembakan | 70 |
| Tabel 17. Opini Masyarakat Tentang Petugas DKP Kepri Yang Akhirnya Menyerah dan Dibawa Paksa Oleh MPM | 71 |
| Tabel 18. Hasil Opini Masyarakat | 72 |

DAFTAR GAMBAR

| | HALAMAN |
|-------------------------------------|---------|
| Gambar 2.7. Model Teori S-O-R | 38 |
| Gambar 2.8. Kerangka Berfikir | 40 |

DAFTAR LAMPIRAN

HALAMAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran I. Cover Kuisisioner | 81 |
| Lampiran II. Pertanyaan Kuisisioner | 82 |
| Lampiran III. Hasil Jawaban dan Opini Masyarakat | 86 |
| Lampiran IV. Rekapitulasi Nama Responden | 90 |
| Lampiran V. Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Surat Kabar Jawa Pos edisi 16 Agustus 2010 | 95 |
| Lampiran VI. Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Surat Kabar Jawa Pos edisi 25 Agustus 2010 | 97 |
| Lampiran VII. Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Surat Kabar Jawa Pos edisi 26 Agustus 2010 | 99 |
| Lampiran VIII. Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Surat Kabar Jawa Pos edisi 27 Agustus 2010 | 101 |

ABSTRAKSI

Deasy Listyani, Opini Masyarakat Tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa, (Studi Deskriptif Opini Masyarakat Tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Edisi 16-27 Agustus 2010)

Pemberitaan tentang penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos dipicu oleh peristiwa yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 2010, hal tersebut menambah konflik dan pro kontra yang terjadi antara Indonesia dengan Malaysia mengenai perbatasan wilayah perairan. Peristiwa ini terjadi saat 3 petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia yang sedang menangkap para nelayan Malaysia diperaikan Indonesia, malah akhirnya ditangkap dan ditahan oleh petugas keamanan laut Malaysia. Dan dengan adanya penangkapan petugas DKP Kepri oleh *Police Marine* Malaysia membuat hubungan diplomatik yang sempat membaik kembali memanas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui opini masyarakat Surabaya tentang pemberitaan penangkapan petugas (DKP) di surat kabar Jawa Pos.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Media Komunikasi Massa, Surat Kabar, Surat Kabar Sebagai Media Komunikasi Massa, Surat Kabar Sebagai Fungsi Informasi, Surat Kabar Sebagai Kontrol Sosial, Opini, Pengertian Berita, dan Teori Stimulus-Organism-Respon.

Metode analisis menggunakan tabel frekuensi, dan data diperoleh dari hasil kuesioner. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah teknik *non probability sampling* dan *Purposive Sampling*.

Dari analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan hasil opini para responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat di wilayah Surabaya berada pada kategori negatif. Hal ini dikarenakan responden tidak mendukung dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh polisi Malaysia kepada petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau. Dalam pemberitaan itu dapat disimpulkan dimana diperlukan adanya hubungan bilateral yang baik, serta peranan semua pihak dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

Keyword : Opini, pemberitaan penangkapan petugas (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia, Jawa Pos

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kata – kata seperti Gayang Malaysia, bungkus, libas, Malingsia hingga sweping penduduk Malaysia yang saat ini tinggal di Indonesia, hampir tiap hari menjadi topik diberbagai media dan selalu menjadi perbincangan hangat diberbagai lapisan masyarakat diseluruh nusantara.

Sebenarnya peristiwa ini dipicu, saat menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke 65. Peristiwa ini terjadi saat 3 petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia yang sedang menangkap para nelayan Malaysia diperairan Indonesia, malah akhirnya ditangkap dan ditahan oleh petugas keamanan laut Malaysia.

Peristiwa ini jelas sangat memukul perasaan, harkat dan martabat rakyat Indonesia, yang saat itu tengah memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Pasang surut hubungan Indonesia – Malaysia sebenarnya sering mengalami masalah, seperti kasus Dwikora, Sipadan – Ligitan, Ambalat, dan seni kebudayaan bangsa yang banyak diklaim milik Malaysia.

Pengamat Hukum Internasional dari Universitas Nusa Cendana Kupang Wilhelmus Wetan Songa, SH.MHum, berpendapat utusan Indonesia dalam perundingan masalah perbatasan kedua negara di Kota Kinabalu, Negara Bagian

Sabah, Malaysia, pada hari ini, harus tegas melakukan diplomasi. "Diplomasi yang tegas itu dimaksud selain untuk memastikan batas wilayah sesungguhnya, juga sebagai salah bentuk peringatan terakhir bagi negeri Jiran itu tidak mengulang lagi tindakan-tindakan yang salah sebelumnya," katanya di Kupang, Senin, menanggapi perundingan antara Indonesia dan Malaysia di Kinabalu, 6 September 2010. Wetan Songa yang juga dosen Fakultas Hukum Undana Kupang ini, mengatakan, sudah menjadi ketetapan pemerintahan Indonesia bahwa masalah ini dipercepat, dan telah pula ditegaskan tahapan perundingannya, sehingga jangan sampai kesempatan ini disia – siakan. Karena menurut dia, berbagai diplomasi terdahulu antar pejabat tinggi kedua negara ini sering digelar, namun tidak ada hasil dan titik temu. Akibatnya berbagai pelanggaran dan insiden terus terjadi dan membuat hubungan RI-Malaysia semakin memanas seperti yang baru saja terjadi di perairan Selat Malaka dimana pihak Malaysia sewenang-wenang menangkap dan menahan tiga staf Kementerian Kelautan dan Perikanan RI hingga akhirnya berbuntut pada sengketa perbatasan RI – Malaysia.

Pemerintah Indonesia akhirnya mengirim nota diplomatik berisi protes keras kepada Malaysia, sehubungan dengan penangkapan dan penahanan tiga petugas Satuan Kerja Pengawas Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun oleh Kepolisian Diraja Malaysia. Nota itu dikirim oleh Direktorat Jenderal Asia-Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri kepada Kedutaan Besar Malaysia di Indonesia kemarin siang. "Intinya, nota diplomatik berisi protes pemerintah Indonesia atas pelanggaran nyata terhadap kedaulatan dan integritas wilayah kita,"

kata Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam keterangan persnya. Indonesia menyatakan mengecam tindakan Kepolisian Perairan Malaysia menahan tiga petugas Pengawas Kelautan dan Perikanan yang sedang berpatroli di perairan Indonesia. "Itu bertentangan dengan hukum internasional," Marty menegaskan. "Dari awal tidak dapat dibenarkan." Dalam nota diplomatik tersebut juga dicantumkan prosedur tetap apabila Malaysia memiliki keperluan untuk memasuki wilayah Indonesia, baik lewat darat, laut, maupun udara. "Termasuk prosedur tetap untuk menyikapi insiden seperti ini, supaya tidak berkembang menjadi masalah serius," Marty menambahkan.

Menurut Marty, nota diplomatik baru dapat dikirim setelah pihaknya memastikan kedua insiden yang terjadi. Dua insiden itu adalah penangkapan nelayan Malaysia oleh para petugas Indonesia yang sedang berpatroli, serta penangkapan oleh Polisi Perairan Malaysia yang terjadi di wilayah Indonesia. Marty mengatakan, Kementerian Luar Negeri merasa perlu mempelajari koordinat terjadinya insiden lebih dulu sebelum mengirim nota diplomatik. Dari situ bisa disimpulkan bahwa lokasi kejadian adalah wilayah Indonesia. "Tidak ada itu gray area. Wilayah kita jelas." Masalahnya, ia menjelaskan, pemerintah Malaysia rupanya juga memiliki klaim serupa di wilayah yang sama. "Memang terjadi overlapping klaim," ujarnya. Klaim Indonesia didasarkan pada Peta Nomor 349 Tahun 2009. Sedangkan Malaysia menyatakan klaimnya atas dasar peta yang lebih tua, yaitu keluaran tahun 1979. "Jadi, posisi kita jelas," kata Marty. Ia menolak tuduhan sejumlah pihak yang mengatakan pemerintah kurang tegas

dalam menyikapi masalah yang selalu berulang dengan Malaysia ini. "Tugas Kementerian Luar Negeri memang melakukan diplomasi melalui instrumen tersebut." Aksi penangkapan oleh polisi Malaysia itu memicu protes banyak kalangan di berbagai daerah di Indonesia. "Tindakan Malaysia itu telah menyepelekan aparat dan bangsa kita secara keseluruhan," kata Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso. Di Sukabumi, Jawa Barat, kemarin ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Miskin Bersatu Kota Sukabumi menggelar protes dengan membakar bendera Malaysia.

Mereka juga mendesak pemerintah bersikap lebih keras terhadap Malaysia. Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato Syed Manshe Afdzaruddin Syed Hassan, Selasa lalu memastikan insiden itu tak akan merusak hubungan Indonesia-Malaysia. "Selat Malaka begitu sempit. Jadi, ini bukan timbul masalah serobot menyerobot. Mereka hanya nelayan tradisional," katanya. Sebelumnya, Menteri luar negeri Malaysia Anifah Aman untuk pertama kalinya menghadiri resepsi HUT kemerdekaan RI ke-65 yang diadakan KBRI Kuala Lumpur, Rabu malam.

Dengan mengenakan pakaian adat Melayu warna biru dan kain songket abu-abu, Anifah menerima nasi tumpeng dari Dubes RI untuk Malaysia Da'i Bachtiar sebagai ungkapan tanda terima kasih dan kehormatan atas kesediaannya hadir pada acara resepsi kemerdekaan Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menlu Malaysia Anifah Aman mengatakan kepada pers mengenai ketegangan hubungan

kedua negara belakangan ini, "Secara keseluruhan hubungan Indonesia - Malaysia sangat baik dan makin baik. Baik di tingkat pemerintahan, pengusaha dan masyarakat kedua negara, tapi harus diakui ada segelintir yang selalu mau merusak hubungan baik itu," kata Anifah, di Kuala Lumpur. "Karena kita bertetangga sudah pasti banyak masalah yang timbul, namun jika jaraknya jauh maka semakin kecil masalah yang timbul. Jadi wajar saja sebagai negara bertetangga sering terjadi konflik akibat salah paham dan lain sebagainya," tambah Menlu Malaysia itu. Namun dari kasus ini, Indonesia-Malaysia sudah sepakat untuk membuat SOP (standard operation procedure) terutama bagi pasukan di perbatasan agar masalah yang muncul di lapangan bisa diselesaikan sendiri, tidak harus sampai ke tingkat menteri bahkan kepala pemerintahan. Dalam resepsi ini, KBRI menampilkan tarian daerah dan pagelaran busana oleh desainer Ratih Sanggarwati.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri ternyata masih punya sejumlah pekerjaan rumah yang menahun soal garis batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Menurut Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, perundingan perbatasan dengan sejumlah negara itu tak hanya wilayah daratan tapi juga perairan.

Perbatasan itu di antaranya adalah perbatasan wilayah darat Indonesia dengan Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Adapun kawasan perairan di antaranya Indonesia dengan 10 negara seperti Malaysia, Singapura, Thailand,

Filipina, Vietnam, India, Palau, Timor Leste, Papua Nugini, dan Australia."Baru ada 16 perundingan batas laut yang sudah selesai," ujar Marty.

Sejauh ini, Indonesia telah melangsungkan perundingan bilateral dengan Malaysia, Singapura, Papua Nugini, Australia, India, Thailand, dan Vietnam, serta perundingan multilateral dengan Malaysia dan Singapura mengenai batas laut di sejumlah wilayah. Sedangkan sisanya, menurut Marty perundingan masih terus dilakukan. Ia mencontohkan, dengan Malaysia, Indonesia belum menyelesaikan perundingan untuk menentukan batas laut di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan perairan Kepulauan Riau lokasi terjadinya insiden penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pekan lalu . "Perundingan sudah dan sedang terus menerus dilakukan," tegas Marty. Ketika ditanya mengenai rencana Malaysia dan Singapura memperluas daratannya dengan cara mengeruk pasir, ia hanya menjawab singkat, "(Perundingan) sedang berjalan juga." Menurut Marty, penyelesaian perundingan batas wilayah membutuhkan waktu yang lama sekali. "Dengan Vietnam baru selesai 30 tahun," ia mencontohkan. Namun ia mengakui menjadikan penentuan batas wilayah sebagai prioritas(www.suaramedia.com)

Dalam kehidupan masyarakat modern, komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang memegang peranan penting terutama dalam proses penyampaian informasi dari satu pihak kepada pihak lain. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memudahkan masyarakat dalam menerima informasi-informasi

tentang peristiwa-peristiwa pesat, pendapat, berita ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Informasi yang layak diberitakan tersebut selanjutnya disajikan dalam media massa baik cetak maupun elektronik. Pemberitaan media cetak khususnya surat kabar masih tetap menjadi andalan untuk mengetahui berbagai peristiwa dan kejadian. Hal ini antara lain karena didukung oleh sifat-sifat khas yang dimiliki oleh surat kabar dibanding media massa yang lain berupa radio dan televisi. Salah satu kelebihan surat kabar ialah mampu memberikan informasi yang lebih lengkap, bisa dibawa ke mana-mana, terdokumentasi sehingga mudah diperoleh bila diperlukan. Sekarang ini diperkirakan dari 45 orang penduduk Indonesia minimal ada satu orang yang berlangganan surat kabar (Cangara, 2004:126-127).

Untuk menyebarkan informasi-informasi kepada khalayak yang bersifat misal diperlukan sebuah media. Media yang dapat menyebarkan semua itu secara luas adalah media massa. Media massa pada umumnya memiliki khalayak yang heterogen dan anonym. Selain itu ciri-ciri dari media massa adalah kemampuannya untuk menimbulkan keserampakan menyampaikan informasi secara bersamaan dalam waktu yang sama, dan sifatnya melembaga serta umum (Ardianto dan Lukiaty, 2004:9-10).

Media massa (*mass media*) adalah sarana komunikasi massa (*channel of mass communication*). Komunikasi massa sendiri, di kemukakan oleh Rakhmat yaitu sebagai jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonym melalui media cetak atau elektronik sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat (Ardianto, 2004 : 7).

Menurut *Melvin Defleur* dan *Sandra Ball Rakeach* terdapat tiga perpektif tentang khalayak terhadap media, yaitu perpektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, perpektif hubungan sosial. Menurut Jefres mengemukakan bebrapa alasan mengapa orang menggunakan media massa, yaitu :situasi konsumsi/penggunaan media, pola penggunaan media massa. *Erie Country Study* mengemukakan bahwa media massa tidak mengontrol cara berfikir pemilih.

Khalayak membutuhkan media massa berdasarkan motif-motif tertentu,karena itu media massa berusaha memenuhi kebutuhan sosial khalayak tertentu. Media yang mampu memuaskan khalayaknya adalah media yang efektif (Subiakto,2003 : 3). *Scrham* dan *Roberts* menyatakan bahwa suatu audience yang sangat efektif mencari apa yang mereka inginkan, menolak isi media dan pesan yang tidak sesuai serta menguji pesan media atau membandingkannya dengan isi media lainnya (Lilik, 2001 : 3).

Media massa terbagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik. Pertama, media massa elektronik yang meliputi : Radio, televisi, internet dan sebagainya. Kedua, media massa cetak yang meliputi : surat kabar, majalah, tabloid, harus bercirikan publisitas, universalitas dan aktualitas. Publisitas diartikan bahwa media cetak diperuntukkan untuk umum dan harus menyangkut kepentingan umum. Sedangkan universalitas diartikan bahwa media cetak harus memuat aneka berita mengenai kejadian-kejadian tentang segala aspek kehidupan manusia. Dan aktualitas dapat diartikan bahwa media cetak juga harus memiliki kecepatan dalam setiap menyampaikan laporan kepada khalayaknya.

Surat kabar, majalah, tabloid atau media berkala lainnya masuk didalam kategori media cetak. Berbicara mengenai media cetak juga tidak bisa lepas dari kegiatan jurnalistik. Jurnalistik juga dapat didefinisikan sebagai teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan informasi sampai kepada penyebarluasan informasi kepada khalayak luas. Baik itu fakta maupun opini yang diucapkan oleh orang lain, bila kedua hal tersebut dikategorikan menarik maka akan menjadi bahan dasar bagi jurnalistik, yang digunakan sebagai berita untuk disebarluaskan kepada masyarakat, Jurnalistik diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, dan menulis untuk Surat kabar, majalah, taboid atau media cetak berkala lainnya (Assegaff, 1983 : 9).

Media cetak surat kabar mempunyai kelebihan lain selain mampu membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting,yaitu memungkinkan penyampain pesan secara serempak dalam waktu yang relative singkat dan bersamaan kepada para pembacanya yang berisfat anonym, heterogen, dan secara fisik berjauhan. Kelebihan lain yang dimiliki oleh media cetak dan ini tidak dimiliki oleh media massa elektronik adalah media massa cetak termasuk surat kabar memberikan kesempatan berfikir dan berefleksi kepada pembacanya yang justru pada kesempatan untuk berefleksi itulah letak kesanggupan manusia berfikir dan berkomunikasi dengan dirinya maupu dengan lingkungannya.

Perbatasan menjadi permasalahan antara negara Indonesia dengan Malaysia yang sampai saat ini belum menemukan titik terang. Begitu pula tentang pemberitaan yang muncul diberbagai media massa salah satunya di surat kabar Jawa Pos edisi 16 Agustus 2010 “Indonesia memprotes Malaysia” dimana terjadi penyanderaan oleh Polis Diraja Malaysia. Kemenlu berusaha untuk membebaskan tiga petugas (DKP). Kronologi penyanderaan tersebut saat patrol di perairan Tanjung Berakit, Bintan, Kepri, petugas gabungan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Batam menangkap tujuh nelayan Malaysia yang mencari ikan di kawasan itu. Tiga petugas DKP lalu pindah ke kapal nelayan untuk menggiring mereka ke Batam guna diperiksa. Ketika membawa tujuh nelayan Malaysia tersebut menuju Batam untuk diperiksa, petugas DKP dihadang polisi perairan Malaysia. Mereka meminta petugas DKP melepas tujuh nelayan Malaysia. Tetapi, petugas DKP menolak melepaskan. Terjadi ketegangan, polisi perairan Malaysia marah dan melepaskan dua tembakan peringatan ke petugas DKP yang tidak bersenjata. Tiga petugas DKP yang membawa tujuh nelayan Malaysia segera merapat ke kawasan Indonesia. Tiga petugas DKP lainnya digiring Polisi Malaysia karena berada di kapal nelayan Malaysia. Mereka lantas dibawa ke Johor. Penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kepulauan Riau (DKP Kepri) yang berpatroli di perbatasan laut oleh pasukan Gerak Marin atau Marine Police Malaysia (MPM) berbuntut. Kemenlu serta Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memprotes keras pemerintah Indonesia. Dan di surat kabar Jawa Pos edisi 25 Agustus 2010 menceritakan mengenai testimoni tiga petugas DKP Kepri yang ditahan Polisi Malaysia. Tiga petugas DKP tidak yakin dengan posisi pada

saat penangkapan berlangsung dikarenakan pada saat ketegangan terjadi *global positioning system* (GPS) dalam kondisi mati karena kehabisan baterai. Padahal rekaman GPS yang menunjukkan posisi kapal tersebut sebenarnya bisa menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk berdiplomasi dengan Malaysia. Namun salah satu petugas mengatakan bahwa ia yakin betul berada di wilayah Indonesia karena hanya 30 menit perjalanan dari pantai. Pada saat penahanan Seivo salah satu petugas DKP yang ditahan mengatakan polisi Malaysia tidak melakukan kekerasan fisik. Meskipun interogasi sempat dilakukan dengan nada keras. Tiga petugas DKP itu juga membantah dugaan adanya pemerasan kepada nelayan Malaysia dengan berani bersumpah.

Dengan menanggapi pemberitaan mengenai Penangkapan Petugas DKP Kepri oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos tentang pelanggaran perbatasan wilayah kelautan telah terjadi pro dan kontra mengenai perbatasan yaitu sebagai berikut :

Menurut Munawar seharusnya dalam setiap operasi pengawasan perikanan ada satuan tugas gabungan yang melibatkan POLRI atau TNI AL, sehingga tindakan serta kekuatan kapal patrolinya bisa bertambah. "Sehingga laut serta ikan atau potensi-potensi yang ada didalamnya sudah saatnya harus di perhatikan sebagai aset besar yang harus di jaga dari praktek-praktek *illegal fishing*," tandas anggota FPKS ini. Menurut anggota Komisi IX DPR Rofi' Munawar "Tindakan khusus seperti pembakaran dan penenggelaman kapal-kapal ikan berbendera asing yang melakukan illegal fishing saat ini diharapkan bisa menjadi opsi pertama yang diambil," ujar anggota Komisi IX DPR, Rofi' Munawar dalam siaran pers yang dikirim kepada detikcom, Senin (16/8/2010). Komisi IV adalah komisi DPR yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan. (<http://gresnews.com/ch/TopStories/cl/Laskar+Merah+Putih/id/1412750/Soal+Penangkapan+3+Petugas+DKP+Malaysia+Harus+Diberi+Pelajaran>)

Sedangkan untuk opini yang bersifat kontra adalah sebagai berikut :

Menurut Dubes Malaysia untuk Indonesia Datuk Syed Munshe Afdzaruddin menilai, insiden di Selat Malaka yang berakibat ditangkanya tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Kepri oleh Malaysia sebagai insiden kecil. Hal ini disampaikannya usai mengikuti upacara puncak peringatan nasional HUT ke-65 RI di Istana Merdeka. Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Selasa (17/8/0. “Ini isu kecil yang bisa dilakukan (diselesaikan) dengan persahabatan serumpun. Hubungan Malaysia dan Indonesia perfect, tidak ada keraguan,” ujar Afdzaruddin. Dia juga menegaskan, tujuh nelayan yang tertangkap di wilayah perairan Indonesia tidak bermaksud melakukan penyusupan atau provokasi terhadap patroli Indonesia. Mereka adalah para nelayan tradisional yang sehari-hari mencari ikan di perairan tersebut dan tidak sengaja perahunya melewati batas wilayah. (<http://bataviase.co.id/node/346553>)

Opini adalah suatu hasil interaksi dan pemikiran manusia tentang suatu hal yang kemudian dinyatakan atau diekspresikan. Dalam kaitan dengan proses komunikasi terdapat efek, dan salah satu jenisnya adalah opini. Opini dapat diidentifikasi sebagai suatu pernyataan atau sikap dalam berkata-kata. Dengan kata lain, individu mempunyai kecenderungan bertindak sesuai dengan kepercayaan mengacu pada apa yang diterima adalah benar.

Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana arah opini masyarakat tentang pemberitaan penangkapan petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP Kepri) oleh polisi Malaysia tentang pelanggaran perbatasan wilayah kelautan di Jawa Pos. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melihat dan ingin mengetahui opini masyarakat mengenai pemberitaan yang membawa hubungan diplomatik antara Indonesia – Malaysia yang kembali memanas. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah masyarakat (usia 17 – 50 tahun) karena asumsi mereka kritis terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat dan mampu memberikan alasan. Dan sampel yang digunakan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Surabaya dikarenakan koran Jawa Pos

merupakan harian terbesar di Jawa Timur, dan merupakan salah satu harian dengan oplah terbesar di Indonesia. Jawa Pos mengklaim sebagai "Harian Nasional yang Terbit dari Surabaya" sebagai kantor pusatnya yang bertempat di Gedung Graha Pena Jalan Ahmad Yani 88 Surabaya (www.wikipedia.com/07/05/2001/22;59). Selain itu masyarakat Surabaya yang memiliki ciri kosmopolitan antara lain masyarakatnya bersifat individual, suka pada keterbukaan dan dekat dengan media massa, dan Surabaya juga merupakan kota metropolis dan kota terbesar kedua setelah Jakarta dilihat dari padatnya penduduk. Selain itu, mengapa peneliti memilih kota Surabaya sebagai wilayah penelitian karena masyarakat Surabaya banyak menerima informasi dan daerah perkotaan merupakan tempat yang penduduknya mudah memperoleh media massa khususnya media cetak.

Peneliti berlandaskan pada teori S-O-R terdiri dari singkatan *Stimulus*, *Organism*, dan *Response*. Model ini menunjukkan bahwa komunikasi merupakan proses aksi – reaksi, artinya model ini nantinya berguna untuk memberikan gambaran tentang efek media, dimana teori tersebut menunjukkan adanya respon dari *audience* selaku komunikan dalam menanggapi *stimulus* berupa akan merangsang orang lain memberikan respon dengan cara tertentu. Uraian diatas merupakan permasalahan yang melatar belakangi ketertarikan peneliti untuk meneliti Opini Masyarakat Tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah “ Bagaimana arah opini masyarakat tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos ”?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui opini masyarakat tentang Pemberitaan Penangkapan Petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kepulauan Riau oleh Polisi Malaysia di Surat Kabar Jawa Pos

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan Ilmu Komunikasi khususnya dalam bidang komunikasi massa yaitu pada pengaruh media massa cetak yang berkaitan dengan opini khalayak khususnya bagi masyarakat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan untuk mengetahui Opini Masyarakat Terhadap Pemberitaan di Jawa Pos tentang

perbatasan wilayah kelautan antara Indonesia dengan Malaysia serta memberi pandangan kepada khalayak akan pentingnya informasi